

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA**

SKRIPSI

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN
PAJAK KENDARAAN ATAS AIR
DI PROPINSI SUMATERA SELATAN**



Diajukan Oleh :

**HERTA
01023120030**

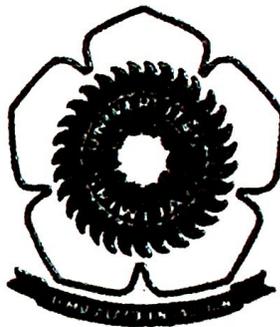
**Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat
Guna Mencapai Gelar
Sarjana Ekonomi
2007**



UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA

SKRIPSI

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN
PAJAK KENDARAAN ATAS AIR
DI PROPINSI SUMATERA SELATAN**



Diajukan Oleh :

HERTA

01023120030

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat

Guna Mencapai Gelar

Sarjana Ekonomi

2007

S
336.23
Hert
a
2007

15848
16210

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**NAMA : HERTA
NIM : 01023120030
JURUSAN : EKONOMI PEMBANGUNAN
MATA KULIAH : PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN
DAERAH
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DAN PAJAK KENDARAAN ATAS AIR
DI PROPINSI SUMATERA SELATAN**

PANITIA PEMBIMBING SKRIPSI

TANGGAL 1 MEI 2007 , KETUA SKRIPSI



**DR. AZWARDI M.SI
NIP. 132050494**

TANGGAL 28 APRIL 2007 , ANGGOTA



**DRA. EKA ROSTARTIANA
NIP. 131271080**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA**

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN
PAJAK KENDARAAN ATAS AIR
DI PROPINSI SUMATERA SELATAN**

**Disusun oleh :
HERTA
01023120030**

**Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Komprehensif
Pada hari Selasa, tanggal 15 Mei 2007
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima**

**Panitia Ujian Komprehensif
Inderalaya, Mei 2007**

Ketua



**Dr. Azwardi, M.Si
NIP. 132050494**

Anggota



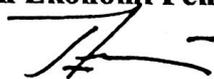
**Dra. Eka Rostartina
NIP. 131271080**

Anggota



**Dra. Hj. Sa'adah Yuliana, M.Si
NIP. 131885904**

**Mengetahui
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan**



**Dr. Taufiq Marwa, M.Si
NIP. 132050493**

Motto :

>>> Hidup Adalah Rintangannya yang Harus Dihadapi

Perjuangan yang Harus Dimenangkan

Rahasia yang Harus Digali

Dan, Anugerah yang harus dipergunakan <<<

Kupersembahkan kepada :

- ❖ **Mama dan Papa Tercinta**
- ❖ **Adik-adikku tersayang (Ad'Yudha dan Ad' Ayie)**
- ❖ **Hamba Allah yang kelak mendampingi**
- ❖ **Sahabat-sahabatku**
- ❖ **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Pembangunan merupakan serangkaian usaha untuk memperbaiki keadaan menjadi lebih baik dari keadaan sebelumnya. Dalam konteks pelaksanaan pembangunan daerah, kemandirian dalam hal pembiayaan daerah semenjak diberlakukannya otonomi daerah semakin diperlukan. Reformasi ternyata membawa angin segar bagi pelaksanaan otonomi daerah yang seutuhnya. Terbukti dengan dikeluarkannya dua Undang-Undang yaitu : Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pemberian otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 bertujuan agar daerah yang bersangkutan dapat mengatur dan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil, guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Konsekuensinya adalah daerah tersebut harus mempunyai keuangan sendiri. Salah satu sumber keuangan tersebut adalah Pendapatan Asli daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagi laba BUMD, penerimaan dinas-dinas dan penerimaan lain-lain.

Pajak daerah Propinsi Sumatera Selatan sampai dengan tahun 2005 memberikan sumbangan yang cukup besar bagi pendapatan daerah. Sedangkan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan pajak kendaraan atas air merupakan salah

satu komponen dari penerimaan pajak daerah yang memberikan kontribusi yang cukup besar dibanding dengan penerimaan pajak lainnya.

Dalam upaya menganalisis penerimaan pajak kendaraan bermotor dan pajak kendaraan atas air, salah satunya yaitu dengan mengetahui efisiensi dan efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor dan pajak kendaraan atas air. Melalui penulisan ini juga ingin dijelaskan mengenai seberapa besar pengaruh jumlah penduduk, jumlah kendaraan bermotor, PDRB, dan Variabel Dummy (sebelum dan sesudah adanya PKAA) terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor dan pajak kendaraan atas air.

Dalam penulisan ini telah diupayakan sebaik mungkin dengan segenap kemampuan yang ada. Namun tentu saja bahwa sesempurna yang diharapkan. Untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan oleh Penulis. Semoga tulisan ini dapat dimanfaatkan bagi kita semua.

Inderalaya, 18 Mei 2007

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Atas Air di Propinsi Sumatera Selatan**. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan isi skripsi ini.

Didalam penulisan skripsi ini, penulis banyak sekali mendapat bantuan, dukungan, bimbingan dan dorongan, baik secara langsung maupun tidak langsung hingga selesainya skripsi ini. Untuk itulah sebagai rasa hormat, penghargaan dan rasa terima kasih yang tulus dan ikhlas penulis ucapkan kepada :

1. *Allah SWT* atas berkat Rahmat dan Karunia-Nyalah serta semua nikmat yang bernilai dan tak terhingga besarnya yang selalu dilimpahkanNya kepada penulis.
2. *Papa dan Mama tercinta*, terima kasih yang tak terhingga atas semua kasih sayang dan doanya selama ini. Semoga *Ananda* dapat mewujudkan cita-cita *Papa dan Mama*. Dan membuat kami merasa orang-orang yang istimewa.
3. Saudara-saudaraku : *Ad'Yudha dan Ad'Ayie*, terima kasih atas bantuan yang tak terhitung dan doanya selama ini, semoga akan terus memberikan supportnya.
4. Bapak *Dr. H. Syamsurijal A.K* selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

5. Bapak *Dr. Taufiq Marwa, M.Si* selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Sriwijaya.
6. Bapak *Dr. Azwardi, M.Si* selaku ketua pembimbing skripsi.
7. Ibu *Dra. Eka Rostartina* selaku anggota pembimbing skripsi.
8. Ibu *Dra. H. Sa'adah Yuliana, M.Si* selaku anggota tim penguji komprehensif.
9. *Yu'Ita*, makasih atas semua perbaikan nilai dan semua bantuan dalam pelaksanaan ujian komprehensif waktu itu.
10. *Yu'Semi*, makasih atas semua bantuan yang tak terhitung nilainya
11. Seluruh Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti kegiatan perkuliahan di Universitas Sriwijaya dan mohon maaf atas kesalahan yang penulis perbuat selama dibangku perkuliahan, tanpa "beliau" penulis akan tetap menjadi manusia bodoh dan staf pegawai karyawan dan karyawan di lingkungan FE UNSRI yang telah banyak membantu penulis.
12. Bapak *Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sumatera Selatan* beserta seluruh staf, yang telah membantu penulis dalam penyediaan data yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.
13. Buat *My-Jupiter and My-Kijang* yang g' lelah-lelahnya menemaniku dalam setiapku melangkah.
14. Buat Anak-anak "GaNg DaRuRrUhAmA" : DjAjied, Cibrai 'Ponjen', Harry 'bagonnx', Maman 'JoLoR', Adi 'KoJeN', Sadat 'BaToSa!', Henru 'KaKeK', Agus 'HaLoM', Sir Gatot, Reno 'BeToX', Nanu 'PeNiNg', Dody, O'ob >>> Makasih atas perTEMANan kalian semua.
15. Untuk teman-teman Angkatan'02 Fakultas Ekonomi UNSRI, Thx 4 everything that u had given 2me during 4 Years n' 9 Month,,,,, RuLie, aq dh nyusul u SE skg tinggal siapa diantara kt kaya dluan he3... Mitha, TeDdy, arY, cepetlah

kalian b-3 nyusul, aq yakin pada kalian semua bahwa kalian bisa "SeManGat...", trus bwat yeni, septy, asma, aning, nopri, epi, dora, rizki, lian, nourma, dewi, rida, listya, dian, ana, mega, wulan, epa, lia, anita, umi, dian lubianti, vivi, sari, benny, alim, parulian, adi barnas, ajib, ista, albeli, dani, azhari, habib, roy, andi, sigit, rawaldi, robert, dedi, yoseph, dorro, bob joe, Andrew, anca, diaz >>> aQ bangga bs bergbung dgn orang-orang besar seperti kalian dalam satu ikatan keluarga ep'02. Trus bwat anak-anak Mgt'02 n Ak'02 especially jay, ferdy, lian, febri, sadli, omie, anto, albert, fikri, puput, tiara, nanak makasih ats pertemanan slama ini, smoga kita tetap bisa berteman walaupun udh g' dikampuss lgiii.

16. Buat Kk tingkatku dan ad tingkatku yang t'bae yang prnah kukenal agus, adam, jamil, encis, unto, tuja, joni, evan, bebek, kcek, bowie, lia, inge, sisti, bunga, yuni, osa, wulan niaja serta yG g' bs diucapin satu-persatu,,,, HeRta uCaPin makasieh yang sebesar-besarnya aTs canda guraunya, tawanya, bimbingannya, supportnya,,,, deNgan kalian Herta bisa lebih mengenal hidup ini lebih baik lagi,,,, Amiinnn.

Akhirnya kepada semua insan yang telah memberikan yang t'baik untuk penulis dari semenjak penulis kecil sampai sekarang, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal atas budi baik tersebut. Semoga kita mendapat ridho dan berkah-NYA samapi akhir hayat dan nanti saat dibangun kembangan di Padang Makhsyar..... Amin Ya Rabbal Allamin.

ABSTRACT

The target of this research is to find out the efficiency and effectiveness from taxes collection of vehicle and taxes of water vehicle in South Sumatra Province, and also to find out the influence of population, the sum of vehicle and the water vehicle, PDRB, Dummy variable (before and after water vehicle taxes exist) toward the tax revenue of vehicle and water vehicle. The variables that is studied in this research are the taxes vehicle revenue and water vehicle revenue, taxes collection cost of vehicle and water vehicle, Population, PDRB, and Dummy variable. The result shows that first, value of efficiency and effectively taxes of vehicle and water vehicle in South Sumatra province is very efficient with effectively level which is very effective in it's collected. Second, population, the sum of vehicle and water vehicle, PDRB, and Dummy variable together influence toward the tax revenue of vehicle and water vehicle in the South Sumatra province with $R^2= 0,993$.

Key Words : Vehicle and water vehicle taxes revenue, taxes collection cost, population, the sum of vehicle and the water vehicle, PDRB, Dummy variable (before and after water vehicle taxes exist).

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efisiensi dan efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor dan pajak kendaraan atas air di Propinsi Sumatera Selatan, serta untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk, jumlah kendaraan bermotor dan kendaraan atas air, PDRB, dan variabel dummy (sebelum dan sesudah adanya pajak kendaraan atas air) terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor dan pajak kendaraan atas air. Variabel-variabel yang dikaji dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak kendaraan bermotor dan kendaraan atas air, biaya pemungutan pajak kendaraan bermotor dan pajak kendaraan atas air, jumlah penduduk, jumlah kendaraan bermotor dan kendaraan atas air, PDRB, dan variabel dummy. Hasilnya menunjukkan bahwa Pertama, nilai efisiensi dan efektivitas pajak kendaraan bermotor dan pajak kendaraan atas air di Propinsi Sumatera Selatan adalah sangat efisien dengan tingkat efektivitas yang sangat efektif dalam pemungutannya. Kedua, jumlah penduduk, jumlah kendaraan bermotor dan kendaraan atas air, PDRB, dan variabel dummy secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor dan pajak kendaraan atas air di Propinsi Sumatera Selatan dengan $R^2 = 0,993$.

Kata Kunci : Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan atas air, biaya pemungutan, Jumlah penduduk, Jumlah kendaraan bermotor dan kendaraan atas air, PDRB, variabel dummy (sebelum dan sesudah adanya pajak kendaraan atas air)

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan Skripsi.....	ii
Halaman Persetujuan Komprehensif.....	iii
Halaman Motto dan Persembahan.....	iv
Kata Pengantar	v
Ucapan Terima Kasih.....	vii
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel.....	xiii
Daftar gambar	xiv
ABSTRACT.....	xv
ABSTRAK.....	xvi

BAB I: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	13

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peranan Pemerintah Dalam Perekonomian.....	14
2.2 Otonomi Daerah.....	19
2.3 Pendapatan Asli Daerah	21
2.4 Pajak.....	25
2.4.1 Definisi Pajak.....	25
2.4.2 Fungsi Pajak.....	27
2.4.3 Ciri-Ciri Pajak.....	27
2.4.4 Prinsip Pajak	28
2.4.5 Asas Pemungutan Pajak.....	29



2.4.6	Cara Pemungutan Pajak	30
2.4.7	Sistem Pemungutan Pajak.....	30
2.4.8	Syarat Pemungutan Pajak.....	31
2.4.9	Teori-teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak.....	32
2.4.10	Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Atas Air.....	33
2.5	Penelitian Terdahulu	34
2.6	Kerangka Pemikiran.....	36
2.4	Hipotesis Penelitian.....	39

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

3.1	Ruang Lingkup Penelitian.....	40
3.2	Sumber Data.....	40
3.3	Teknik Analisis	41
3.4	Batasan Variabel Operasional.....	44

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Kondisi Perekonomian Propinsi Sumatera Selatan.....	46
4.1.1	Pertumbuhan Ekonomi.....	46
4.1.2	Pendapatan Per Kapita	49
4.2	Kondisi keuangan Daerah Propinsi Sumatera Selatan.....	50
4.2.1	Pendapatan Asli Daerah Propinsi Sumatera Selatan.....	50
4.2.2	Pajak Daerah Propinsi Sumatera Selatan	52
4.3	Diskripsi Variabel Penelitian	54
4.3.1	Produk Domestik Regional Bruto	54
4.3.2	Jumlah Penduduk	56
4.3.3	Jumlah Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Atas Air.....	58
4.3.4	Perkembangan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Atas Air	60

4.3.5	Perkembangan Biaya Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Atas Air.....	62
4.4	Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Atas Air Propinsi Sumatera Selatan.....	65
4.4.1	Analisis Efisiensi dan Efektifitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Atas Air	65
4.4.1.1	Analisis Efisiensi.....	65
4.4.1.2	Analisis Efektifitas	69
4.4.2	Pengaruh Jumlah Penduduk, Jumlah Kendaraan Bermotor, PDRB, dan Variabel Dummy Terhadap Jumlah Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Atas Air.....	72
4.4.2.1	Pengujian Ekonometrika	73
4.4.2.2	Pengujian Statistik.....	77
4.5	Faktor Kendala dan Pendorong dalam Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Atas Air	87
4.5.1	Faktor Kendala Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Atas Air.....	88
4.5.2	Faktor Pendorong Peningkatan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Atas Air.....	89

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

5.1	Kesimpulan	91
5.2	Saran.....	94

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1.1	Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Propinsi Sumatera Selatan Tahun 1996-2005 6
Tabel 1.2	Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Kendaraan Atas Air (PKAA) terhadap total Pajak Daerah Propinsi Sumatera Selatan Tahun 1996-2005 11
Tabel 4.1.	Produk Domestik Regional Bruto Propinsi Sumatera Selatan Atas Dasar Harga Konstan 2000 (Dengan Migas) Tahun 1996-2005 .. 47
Tabel 4.2	Pendapatan Regional Per Kapita Provinsi Sumatera Selatan Atas Dasar Harga Konstan 2000 (Dengan Migas) Tahun 1996-2005 .. 50
Tabel 4.3	Realisasi Pendapatan Asli Daerah Propinsi Sumatera Selatan Tahun 1996-2005 51
Tabel 4.4	Realisasi Pajak Daerah Propinsi Sumatera Selatan Tahun 1996-2005 . 53
Tabel 4.5.	Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Menurut Sektor Propinsi Sumatera Selatan Atas Dasar Harga Konstan 2000 (Dengan Migas) Tahun 1996-2005 55
Tabel 4.6	Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Provinsi Sumatera Selatan Tahun 1996-2005 57
Tabel 4.7	Jumlah Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Atas Air Propinsi Sumatera Selatan Tahun 1996-2005 59
Tabel 4.8	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Atas Air Propinsi Sumatera Selatan Tahun 1996-2005 61
Tabel 4.9	Biaya Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Atas Air Propinsi Sumatera Selatan Tahun 1996-2005 64
Tabel 4.10	Kriteria Efisiensi Keuangan 67
Tabel 4.11	Nilai Efisiensi Pemungutan PKB dan PKAA Propinsi Sumatera Selatan Tahun 1996-2005 67
Tabel 4.12	Kriteria Efektifitas Keuangan 70
Tabel 4.13	Nilai Efektifitas Pemungutan PKB dan PKAA Propinsi Sumatera Selatan Tahun 1996-2005 70

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
Gambar 2.1	Skema Kerangka Pemikiran	38
Gambar 4.1	Hasil Regresi Uji Heteroskedastisitas	74
Gambar 4.2	Hasil Regresi Uji Normalitas	77

ABSTRACT

The target of this research is to find out the efficiency and effectiveness from taxes collection of vehicle and taxes of water vehicle in South Sumatra Province, and also to find out the influence of population, the sum of vehicle and the water vehicle, PDRB, Dummy variable (before and after water vehicle taxes exist) toward the tax revenue of vehicle and water vehicle. The variables that is studied in this research are the taxes vehicle revenue and water vehicle revenue, taxes collection cost of vehicle and water vehicle, Population, PDRB, and Dummy variable. The result shows that first, value of efficiency and effectively taxes of vehicle and water vehicle in South Sumatra province is very efficient with effectively level which is very effective in it's collected. Second, population, the sum of vehicle and water vehicle, PDRB, and Dummy variable together influence toward the tax revenue of vehicle and water vehicle in the South Sumatra province with $R^2= 0,993$.

Key Words : Vehicle and water vehicle taxes revenue, taxes collection cost, population, the sum of vehicle and the water vehicle, PDRB, Dummy variable (before and after water vehicle taxes exist).

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efisiensi dan efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor dan pajak kendaraan atas air di Propinsi Sumatera Selatan, serta untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk, jumlah kendaraan bermotor dan kendaraan atas air, PDRB, dan variabel dummy (sebelum dan sesudah adanya pajak kendaraan atas air) terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor dan pajak kendaraan atas air. Variabel-variabel yang dikaji dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak kendaraan bermotor dan kendaraan atas air, biaya pemungutan pajak kendaraan bermotor dan pajak kendaraan atas air, jumlah penduduk, jumlah kendaraan bermotor dan kendaraan atas air, PDRB, dan variabel dummy. Hasilnya menunjukkan bahwa Pertama, nilai efisiensi dan efektivitas pajak kendaraan bermotor dan pajak kendaraan atas air di Propinsi Sumatera Selatan adalah sangat efisien dengan tingkat efektivitas yang sangat efektif dalam pemungutannya. Kedua, jumlah penduduk, jumlah kendaraan bermotor dan kendaraan atas air, PDRB, dan variabel dummy secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor dan pajak kendaraan atas air di Propinsi Sumatera Selatan dengan $R^2 = 0,993$.

Kata Kunci : Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan atas air, biaya pemungutan, Jumlah penduduk, Jumlah kendaraan bermotor dan kendaraan atas air, PDRB, variabel dummy (sebelum dan sesudah adanya pajak kendaraan atas air)

BAB I

PENDAHULUAN

L1 Latar belakang

Negara Indonesia adalah salah satu negara yang sedang berkembang. Sebagai salah satu negara berkembang, pembangunan menjadi prioritas utama guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu keadilan dan kesejahteraan masyarakat yang merata di segala bidang, yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Selain itu pembangunan di segala bidang juga perlu dilaksanakan agar Indonesia sebagai negara berkembang mampu untuk bersaing dengan negara maju.

Pembangunan diartikan sebagai suatu proses multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap-sikap mental yang sudah terbiasa dan lembaga-lembaga nasional termasuk pula percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan dan pemberantasan kemiskinan. Namun demikian, semua itu telah mengalami perubahan, mencakup dimensi yang lebih luas yang mencakup berbagai aspek kehidupan. Sehingga dapat diartikan , pembangunan adalah suatu orientasi dari kegiatan usaha tanpa akhir (Faisal Basri, 1997 : 56).

Dalam konteks pelaksanaan pembangunan daerah, kemandirian dalam pembiayaan yang berasal dari pendapatan daerah makin diperlukan, untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah yang berkesinambungan. Pemerintah daerah dituntut untuk lebih berperan dalam menjalankan fungsinya untuk dapat menggali potensi sumber daya yang ada didaerah, terutama sumber-sumber keuangan

yang berasal dari daerah sendiri sebagai modal dasar bagi daerah guna memperkecil ketergantungan dana pada pemerintah pusat (Bachrul Elmi, 2002 : 8).

Untuk mencapai keadaan itu, pemerintah Indonesia memberikan kebebasan bagi setiap daerah untuk membangun dan mencapai tujuan pembangunan di segala bidang dengan otonomi daerah. Untuk mendukung hal itu, maka pemerintah mengeluarkan undang-undang mengenai desentralisasi yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.

Proses desentralisasi yang difasilitasi oleh Undang-Undang Nomor 32 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 telah menggeser paradigma kesuatu perubahan dimana setiap daerah diberikan hak, sekaligus kewenangan yang seluas-luasnya untuk melaksanakan otonomi daerah dengan penyerahan 4 (empat) elemen dasar dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yaitu desentralisasi politik (*devolusi*), desentralisasi fiskal (*fiscal decentralization*), desentralisasi administrasi (*administration decentralization*), dan desentralisasi ekonomi (*economy decentralization*) yang akan menjadi kewajiban daerah untuk mengelolanya secara efektif dan efisien serta menumbuhkan kemandirian dan kemampuan daerah dalam melaksanakan fungsinya (Bachrul Elmi ; 2002 :12).

Pengertian desentralisasi fiskal itu sendiri adalah pelimpahan kewenangan kepada daerah untuk menggali dan menggunakan sendiri sumber-sumber penerimaan daerah sesuai dengan potensinya masing-masing. Aspek-aspek utama dari

desentralisasi fiskal adalah tanggung jawab pengeluaran, penerimaan, perpindahan fiskal antar pemerintah, dan pinjaman dari pemerintah lokal (Boex, 2001).

Adapun kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia, menurut Kadjatmiko (2002), dilakukan dengan tujuan, yaitu: (1) Menjaga kesinambungan kebijaksanaan fiskal dalam konteks kebijaksanaan ekonomi makro, (2) Mengoreksi *vertical imbalance*, yaitu memperkecil ketimpangan yang terjadi antara keuangan pemerintah pusat dan keuangan daerah yang dilakukan dengan memperbesar kemampuan pajak daerah, (3) Mengoreksi *horizontal imbalance* yaitu ketimpangan antar daerah dalam kemampuan keuangannya, (4) Meningkatkan akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi dalam rangka peningkatan kinerja Pemerintah Daerah, (5) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dan (6) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di sektor publik.

Dalam hal perpajakan, ini sesuai dengan asas desentralisasi yang menyarankan agar daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya, maka kepada daerah perlu diberi sumber-sumber pembiayaan yang cukup, akan tetapi mengingat kebutuhan negara sendiri dalam melaksanakan tugas-tugas nasional, maka sumber-sumber pembiayaan yang dapat diserahkan pada daerah sifatnya terbatas, oleh karena itu setiap daerah wajib untuk menggali segala kemungkinan sumber keuangan yang sesuai dengan batas-batas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu pemerintah harus mengupayakan peningkatan sumber penerimaan daerah yang salah satunya melalui pemungutan pajak. Untuk menggali sumber dana tersebut diperlukan suatu perencanaan yang matang guna

menghindari kekeliruan dalam melakukan prediksi pendapatan dimasa yang akan datang, sehingga tidak realitisnya anggaran pendapatan dan “mis statement” anggaran pendapatan yang menyebabkan “mis leading” pembelanjaan dapat dihindari (Selamat Bamim, 2002 : 108).

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 5 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, bahwa sumber-sumber pendapatan daerah adalah :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi :
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Lain-lain PAD yang sah.
2. Dana perimbangan, terdiri atas :
 - a. Dana Bagi Hasil;
 - b. Dana Alokasi Umum;
 - c. Dana Alokasi Khusus.
3. Pinjaman Daerah.
4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membayar penyelenggaraan dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Ruang lingkup pajak daerah hanya terbatas pada lapangan yang belum digunakan oleh negara (pusat). Sebaliknya negara juga tidak boleh memungut pajak yang telah dipungut oleh daerah. Selain itu terdapat ketentuan bahwa pajak dari daerah yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh memasuki lapangan pajak dari daerah yang lebih tinggi tingkatannya.

Pungutan pajak daerah dalam hal ini adalah Propinsi Sumatera Selatan besarnya ditentukan oleh pemerintah daerah, dan juga merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini :



Tabel 1.1
Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah
Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Propinsi Sumatera Selatan
1996 – 2005

Tahun	Pajak daerah	PAD	Kontribusi (%)
1996	60.655.271.458	90.386.646.029	67,10
1997	68.005.124.134	187.164.624.447	36,34
1998	47.315.276.696	259.492.716.720	18,23
1999	70.795.725.712	303.741.376.076	23,30
2000	104.273.700.600	344.080.295.332	30,30
2001	164.856.086.130	582.214.222.690	28,31
2002	228.474.715.566	814.868.866.529	28,03
2003	307.644.966.607	939.996.389.570	32,72
2004	413.510.830.320	937.812.272.044	44,09
2005	511.381.782.892	1.086.100.105.448	47,08
Rata-rata			35,56

Sumber : Dipenda Propinsi Sumatera Selatan, Realisasi Penenerimaan Daerah Propinsi Sumatera Selatan, 1996 – 2005

Berdasarkan Tabel 1.1 terlihat bahwa penerimaan pajak daerah Propinsi Sumatera Selatan dari tahun 1996 – 2005 terus mengalami kenaikan, hanya pada tahun 1998 terjadi penurunan. Kontribusi terbesar pajak daerah terhadap PAD Propinsi Sumatera Selatan yaitu pada tahun 1996 yaitu sebesar 67,10 persen, sedangkan kontribusi terkecil pada tahun 1998 sebesar 18,23 persen. Apabila dilihat secara keseluruhan, kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PAD Propinsi

Sumatera Selatan selama tahun 1996-2005 naik turun atau fluktuatif dengan rata-rata kontribusi setiap tahun adalah sebesar 35,56 persen.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, ditetapkan sembilan jenis pajak daerah, yaitu tiga jenis pajak daerah tingkat I dan enam jenis pajak daerah tingkat II, yaitu :

1. Pajak Daerah tingkat I terdiri dari :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
2. Pajak Daerah tingkat II terdiri dari :
 - a. Pajak Hotel dan Restoran;
 - b. Pajak Hiburan;
 - c. Pajak Reklame;
 - d. Pajak Penerangan Jalan;
 - e. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C;
 - f. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dikelompokkan menjadi :

1. Jenis pajak Propinsi terdiri atas :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan di Atas Air ((PKB dan PKAA);
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air (BBKNKB dan BBNKAA);
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
 - d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (P3ABT dan AP).
2. Jenis Pajak Daerah Kabupaten/ Kota terdiri atas :
- a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C;
 - g. Pajak Parkir.

Jenis pajak Propinsi bersifat limitatif yang berarti propinsi tidak dapat memungut pajak lain selain yang telah ditetapkan dan hanya dapat menambah retribusi lainnya sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam UU. Adanya pembatasan jenis pajak yang dipungut oleh propinsi terkait dengan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom yang terbatas hanya meliputi kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas daerah kabupaten/kota, serta kewenangan bidang pemerintahan tertentu. Namun demikian, dalam pelaksanaannya propinsi dapat

tidak memungut jenis pajak yang ditetapkan tersebut jika dipandang hasilnya kurang memadai. Berkaitan dengan besarnya tarif, berlaku definitif untuk pajak propinsi yang ditetapkan secara seragam di seluruh Indonesia.

Sedangkan jenis pajak Kabupaten/Kota tidak bersifat limitatif, artinya kabupaten/kota diberi peluang untuk menggali potensi sumber-sumber keuangannya selain yang ditetapkan secara eksplisit dalam UU No.34 Tahun 2000 (Sabrinawaty ; 2005 : 11).

Dalam mengelola keuangan daerah salah satu unsur yang cukup menentukan adalah bagaimana pemerintah daerah mampu untuk mengelola dan mengembangkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, karena kemampuan dan kemandirian suatu daerah dilihat dari seberapa besar PAD daerah tersebut dapat digali dan direalisasikan sesuai dengan potensi daerah tersebut.

Banyak sumber-sumber potensi yang dapat digali oleh daerah otonom untuk meningkatkan pendapatan daerahnya sendiri, salah satunya adalah pajak daerah berupa Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Atas Air.

Pajak Kendaraan bermotor dan Pajak Kendaraan Atas Air adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan Atas Air. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan. Sedangkan kendaraan di atas air adalah semua kendaraan yang

bergerak oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang digunakan di atas air.

Seiring dengan perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 menjadi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, terminologi kendaraan bermotor diperluas menjadi kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air. Hal ini membuat pajak kendaraan bermotor diperluas menjadi Pajak Kendaraan bermotor dan Pajak Kendaraan Atas air. Dalam praktik jenis pajak ini dibagi menjadi dua, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Kendaraan Atas Air (PKAA). Tetapi pada penelitian kali ini akan menggabungkan kedua penerimaan pajak kendaraan tersebut, yaitu pajak kendaraan bermotor dan pajak kendaraan atas air dikarenakan pajak kendaraan bermotor dan pajak kendaraan atas air merupakan komponen yang sangat penting bagi penerimaan pajak daerah.

Adapun dasar hukum pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Atas Air di Propinsi Sumatera Selatan adalah adalah Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Atas Air dan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 212 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 22 Tahun 2001. Sehingga dalam penerimaan Pajak Daerah Propinsi Sumatera Selatan, realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Atas Air merupakan salah satu pos penerimaan Pajak Daerah yang baru terwujud pada tahun 2002.

Berikut ini disajikan tabel penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Atas Air terhadap total Pajak Daerah dari tahun 1996 – 2005 Propinsi Sumatera Selatan.

Tabel 1.2
Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan
Pajak Kendaraan Atas Air (PKAA) Terhadap Total Pajak Daerah
Propinsi Sumatera Selatan
1996 - 2005

Thn	PKB	PKAA	Jumlah PKB dan PKAA	Pajak Daerah	Kontribusi PKB dan PKAA Thd Pjk Daerah (%)
1996	23.683.007.830	-	23.683.007.830	60.655.271.458	39,04
1997	24.870.046.995	-	24.870.046.995	68.005.124.134	36,57
1998	31.665.473.044	-	31.665.473.044	47.315.276.696	66,92
1999	43.122.659.019	-	43.122.659.019	70.795.725.712	60,91
2000	47.064.576.282	-	47.064.576.282	104.273.700.600	45,13
2001	77.486.625.144	-	77.486.625.144	164.856.086.130	47,00
2002	87.027.784.826	96.458.525	87.124.243.351	228.474.715.566	38,13
2003	115.216.929.716	120.000.265	115.336.929.981	307.644.966.607	37,49
2004	145.009.156.321	154.639.075	145.163.795.396	413.510.830.320	35,10
2005	178.048.304.228	180.897.150	178.229.201.378	511.381.782.892	34,85
Rata-rata					44,11

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (1996– 2005)

Berdasarkan data empiris diatas dapat dilihat bahwa pada penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Atas Air terus mengalami pertumbuhan yang positif tetapi pada kontribusi jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor dan pajak kendaraan atas air terhadap penerimaan pajak daerah Sumatera Selatan selama

tahun 1996-2005 naik turun atau fluktuatif dengan rata-rata kontribusi setiap tahun adalah sebesar 44,11 persen.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa jumlah penerimaan dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Atas Air masih harus terus ditingkatkan karena walaupun terus mengalami kenaikan jumlah penerimaannya tetapi kontribusinya terhadap Pajak Daerah relatif berfluktuasi.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Atas Air di propinsi Sumatera Selatan telah dilaksanakan secara efisien dan efektif.
2. Bagaimana pengaruh jumlah kendaraan bermotor dan kendaraan atas air, jumlah penduduk, PDRB, dan terhadap jumlah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Atas Air Propinsi Sumatera Selatan.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui efisiensi dan efektifitas dari pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Atas Air di Propinsi Sumatera Selatan.

2. Untuk menganalisis berapa besar pengaruh jumlah kendaraan bermotor dan kendaraan atas air, jumlah penduduk, dan PDRB terhadap jumlah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Atas Air Propinsi Sumatera Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini ada dua, yaitu :

1. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana kepada Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya
2. Sebagai sumbangan pemikiran kepada Dinas Pendapatan Daerah dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
3. Sebagai bahan pustaka atau referensi bagi penelitian lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- Bamim, Selamat, *"Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Propinsi Sumatera Selatan"*, Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya, Palembang, 2002.
- Basri, Faisal, *Perekonomian Indonesia Menjelang Abad XXI*. Jakarta : Erlangga, 1997.
- Boex, Jameson, 2001, *"An introduction overview of intergovernmental fiscal relations"*.
- BPS Propinsi Sumatera Selatan, *Sumatera Selatan dalam Angka 1996-2005*.
- Dipenda. 1996-2005. *Realisasi Penerimaan Daerah Propinsi Sumatera Selatan*. Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sumatera Selatan.
- Djahjono Achmat dan M. Fakhri Husen, *Perpajakan*, UPPAMPYKPN, Yogyakarta, 1997.
- Dumairy, *Perekonomian Indonesia*, Erlangga. Jakarta, 1996.
- Elianawati, *Analisis Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Lahat*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, 2005.
- Elmi, Bachrul, *Kuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia*, UIPress, Jakarta, 2002.
- Hakim, *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Peningkatan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kota Palembang*. Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, 1989.
- Harman, Marwan, *Kondisi, Permasalahan dan Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Kota Palembang*. Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang. Disampaikan dalam Kuliah Umum Ekonomi, 2004.
- Kadjatniko, *Dinamika Sumber Keuangan bagi Daerah dalam Rangka Otonomi Daerah*. Makalah Disampaikan dalam Matching National Policy Agenda with Local Fiscal Practices: International Workshop on Fiscal Desentralization. Bandung: 4-5 September 2002.
- Kaho, Joseph Riwo, *Analisa Hubungan Pemerintah Pusat-Daerah di Indonesia*. Bina Aksara, Jakarta, 1993.

Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 212 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 22 Tahun 2001.

Nasution, Anwar, *Aspek Ekonomi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Prisma* 5. Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, Jakarta, 1984.

Mangkusubroto, Guritno, *Ekonomi Publik*. Edisi 3. Yogyakarta : PT. BPFE, 2001.

Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Atas Air.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.

PH. Sutrisna, *Dasar-Dasar Ilmu Keuangan Negara*, LPFE UGM, 1998.

Tunggal, Amin Widjaja, *Pelaksanaan Pajak Penghasilan Perseorangan*. Rineka Cipta : Jakarta, 1991.

Sabrinawaty, Meiry, *Analisis Pajak Hotel dan Restoran Kota Palembang*, Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya, Palembang, 2005.

Sari, Nita Darma, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Sumatera Selatan*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, 2005.

Stiglitz, Joseph E. *Economic Of Public Sector*, 2001.

Sukirno, Sadono, *Pengantar Teori Ekonomi*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 1999.

Sumarsen, I Wayan, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuasin*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, 2005.

Suparmoko, *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan daerah*, Penerbit andi, Yogyakarta, 2001.

Susilo, *Sebuah Resep Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan Pendekatan ZOPP*, Lintas Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, 2000.

Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah. Jakarta : Sinar Grafika.

_____, No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Jakarta : Sinar Grafika.

_____, No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah.